

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainal. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum Edisi I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Fajar, Mukti. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hambali, Thalib. 2012. Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Harsono, B. 2020. Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Hukum). Jakarta: Balai Pustaka.
- Husein, Ali Sofwan. 1997. Konflik Pertanahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Julius, S. 2016. Tanah Negara. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Kurniati, N. 2016. Hukum Agraria Sengketa Pertanahan, Penyelesaian Melalui Mediasi Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik. Bandung: Refia Adiatama.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Prenada Media Group.
- Safudin, Endrik. 2018. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang: PT Citra Intrans Selaras.
- Sarjita. 2005. Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Setiawan, Ahmad. 2020. Hukum Pertanahan: Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Suhardono, Edy. 2016). Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers.
- Sutendi, Adrian. 2011. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2019. Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Warman, K. 2018. Perkembangan Pengaturan Pertanahan: Catatan Untuk Penyusunan RUU Pertanahan: Rapat Dengar Pendapat Umum dalam Pembahasan RUU Pertanahan. Jakarta: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Agustine, Dwi. (2017). "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata". Jurnal Rechtsvinding.
- Dantes, Komang Febrinayanti Dantes. (2019). "Kedudukan Harta Kekayaan Debitor yang Dibebankan Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pailit". Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 1, Nomor 2.
- Dantes, Komang Febrinayanti & I Gusti Ayu Apsari Hadi. (2021). "Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng". Jurnal Komuniku Hukum. Volume 7, Nomor 1.
- Dantes, Komang Febrinayanti & I Gusti Ayu Apsari Hadi. (2021). "Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 9, Nomor 3.
- Frisutami, Desi. (2016). Strategi Badan Pertanahan Nasional Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Konflik Pertanahan: Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. JISPAR. Volume 5, Issue 2. 2016. ISSN 2089-6123
- Mahfiana, Layyin. (2013). "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo". Kodifikasia, Volume 7 Nomor 1, 83-102.
- Pomalingo, A. (2013). "Peran Badan Pertahanan Nasional (BPN) Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah yang Memenuhi Azaz Kepastian Hukum". Academia, 1-13.

- Pramita, Kadek Desy & I Gusti Ketut Riski Suputra. (2021). "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1298/Pid. B/2018/PN.Dps. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Volume 2, Nomor 2.
- Rachman, Noer Fauzi. (2013). Rantai Konflik Agraria Kronis, Sistematis, dan Penjelasan Kronik di Indonesia. *Bhumi, Jurnal Ilmiah PPPM-STPN Bidang Pertanahan*, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.
- Sahnan, Arba, M., & Suhartana, L. W. (2019). "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". *Jurnal IUS*, Volume 7 Nomor 5, 438-450.
- Salimubun, Ahmad Firmansyah, Simanjuntak, K. W., & Lestaluhu, R. (2023). Peranan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Hak Atas Tanah di Kabupaten Nabire. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(1), 52–57. Retrieved from <http://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jlj/article/view/2668> diakses tanggal 23 September 2023
- Sappe, Suryani, dkk. (2021). "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa". *Batulis: Civil Law Review*, Volume 2 Nomor 1, 78-92.
- Setianto, Muhamad Jodi. (2020). "Peranan Hukum Adat Bali (Pararem) dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 8, Nomor 2.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. (2011). "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali". *Negara Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 28-306.
- Somadiyono, S. (2017). "Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi". *Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 53-63.
- Sudiatmaka, Ketut, Ratna Artha Windari, Made Sugi Hartono & I Gusti Ayu Apsari Hadi. (2020). "Legal Protection and The Empowerment of The Disabled Community in Buleleng Regency". *Ganesha Law Review*. Volume 2, Issue 1.
- Surata, I Gede. (2022). Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 2 Desember 2022, diakses pada <https://ejournal.unipas.ac.id/> tanggal 24 September 2023
- Syafrizka, M. F. (2020). "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang". *Soumatera Law Review*, Volume 3 Nomor 2, 234-246.
- Tasliman, Michael Timothy. (2021). "Penyusunan Pedoman Pengendalian Penguasaan Tanah di Pulau- Pulau Kecil Terluar Dalam Upaya Bela Negara". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 11 Nomor 3. 104-118
- Wowor, F. A. (2014). "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah". *Lex Privatum*, Volume II, Nomor 2, 95-104.

ARTIKEL DALAM INTERNET

- Ambarawa Semarang. (2022, Juni 16). Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan di Pendopo Kantor Kecamatan Ambarawa. Diambil kembali dari ambarawa.semarangkab.go.id:
<https://ambarawa.semarangkab.go.id/sosialisasi-pencegahan-kasus-pertanahan-di-pendopo-kantor-kecamatan-ambarawa/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2023.
- BPN. (2016, Juli 26). Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Diambil kembali dari [bpn.go.id](http://www.bpn.go.id): [http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Struktur -Organisasi-Pejabat/Kementrian-Agraria-dan Tata Ruang-BPN](http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi-Pejabat/Kementrian-Agraria-dan-Tata-Ruang-BPN), diakses pada tanggal 5 September 2022.
- Hukumonline. (2021, Oktober). Urgensi Pencegahan untuk Tekan Kasus Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan. Diambil kembali dari [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com):
<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pencegahan-untuk-tekan-kasus-sengketa-konflik--dan-perkara-pertanahan-lt61601ccf79ead/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2023.
- Yanwardhana, E. (2022, Februari 24). Menteri ATR: Ada 8000 Kasus Sengketa Tanah. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah#:~:text=%22Saat%20ini%20jumlah%20tanah%20sengketa,yang%20terdaftar%2C%22%20kata%20Sofyan>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Putri, N. W. 2016. Keududukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Palembang. Skripsi (tidak diterbitkan). Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Saputry, S. E. 2021. Penyelesaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah. Skripsi (tidak diterbitkan). Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1369 Tahun 2020.

